

TANTANGAN PEMULIHAN KRISIS DI KAWASAN ASIA PASIFIK

(Catatan Hasil Pertemuan *APEC Finance Deputies'*
Meeting 22-24 Februari 2011 San Francisco, USA)

(Imran Rosjadi)

Economic Outlook and Policy Challenges for the Asia-Pacific Region.

Outlook IMF secara umum berisi tentang perekonomian serta tantangan yang dihadapi di kawasan Asia Pasifik. Pemulihan terhadap krisis berjalan kurang berimbang. Ekonomi maju mengalami pertumbuhan yang relatif *modest*, sementara pertumbuhan di *emerging economies* berjalan dengan cepat. Pertumbuhan secara umum pada semester kedua melebihi yang diharapkan dan tanda peningkatan *private demand* mulai tampak di ekonomi maju, namun ketidakseimbangan internal dan eksternal yang substansial masih terjadi dan tekanan inflasi terus terjadi sebagai akibat naiknya harga pangan dan komoditas.

Fenomena krisis yang berawal pada 2007 mengakibatkan peningkatan *unemployment rate* tertinggi dalam sejarah. Risiko peningkatan *unemployment rate* masih terus dialami oleh sebagian besar ekonomi maju, sementara risiko *over heating* dialami oleh sebagian besar ekonomi berkembang yang diakibatkan oleh aliran *hot money* ke dalam perekonomian. *IMF* merekomendasikan agar ekonomi maju terus melakukan percepatan, perbaikan, dan reformasi keuangan. Melalui *external surplus* yang terus berlangsung di ekonomi maju akan memudahkan untuk mereformasi diberbagai bidang seperti produksi, dan pasar tenaga kerja, sedang dalam jangka menengah melalui *external deficit*, ekonomi maju dapat melakukan konsolidasi fiskal yang kredibel. Sementara itu, ekonomi berkembang dapat mengatur *capital inflows* dan mengatasi permasalahan *overheating*.

Beberapa pandangan anggota *APEC* terhadap *outlook* dan *policy challenges-IMF*. China memandang perlu anggota *APEC* untuk tidak hanya memfokuskan pada *rebalancing economy*, namun berusaha mewujudkan

strong sustainable and balance growth sebagaimana disepakati pada pertemuan G-20 di Toronto. Dalam kesempatan tersebut, China memberikan *sharing information* mengenai keberhasilannya dalam merubah struktur *GDP*. Selama tahun 2010, China telah berhasil meningkatkan *domestic demand*, konsumsi dan investasi terhadap *GDP* dengan kontribusi sebesar 93 persen. Sedangkan ekspor netto hanya memberikan kontribusi sebesar 7 persen. Selain itu, China menyampaikan tingginya risiko *capital inflows* dan peningkatan harga komoditas serta pangan terhadap *emerging economies*. Walaupun peningkatan harga masih dalam kontrol, namun risiko inflasi dari impor dan *hot money* mengharuskan China untuk menerapkan kebijakan *prudent macro economic*, meningkatkan *adequacy rate ratio*, dan *interest rate*.

Sementara itu, Korea menyampaikan perhatiannya pada reaksi kebijakan terhadap volatilitas harga komoditas. Korea mengkhawatirkan bahwa reaksi tersebut justru dapat mengakibatkan distorsi terhadap perekonomian, contohnya restriksi terhadap ekspor. Australia lebih menekankan pada pentingnya mekanisme pasar dapat bekerja secara efektif dengan melalui perdagangan bebas produk pertanian dan transparansi. Hal lain yang juga menarik adalah Australia melihat peningkatan *intra-regional trade* telah meningkatkan ketahanan *emerging economies* terhadap krisis.

Indonesia menjelaskan bahwa anggota *APEC* tidak hanya memfokuskan pada *overheating* melainkan juga risiko inflasi mengingat potensi tekanan inflasi lebih karena kenaikan harga dan bukan karena inflasi inti semata. Terkait dengan peningkatan harga pangan, *APEC* sebaiknya melihat dari sudut pandang yang luas disebabkan anggota *APEC* bukan hanya terdiri dari ekonomi konsumen pangan melainkan juga ada ekonomi produsen pangan. Selanjutnya Malaysia menguraikan tentang pentingnya sebuah kebijakan *tailored made* terhadap karakteristik ekonomi. Walaupun Malaysia merupakan salah satu ekonomi berkembang dengan *external surplus*, namun mayoritas eksportnya berasal dari kelapa

sawit, sehingga peningkatan *domestic demand* sangat tidak dimungkinkan. Hal lain yang juga menarik adalah ADB berpandangan bahwa permasalahan substansial yang terjadi adalah pasar tidak dapat bekerja secara efektif dikarenakan peningkatan harga pangan yang tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan petani lokal di *Emerging Market*. ADB menyepakati *rebalancing economy* tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan *domestic demand* namun dilakukan dengan meningkatkan *intra-regional trade*.

Trends in Capital Flows to the Asia-Pacific Region and Policy Implications. US Treasury Department, menyampaikan tentang *capital flows* dapat memberikan dampak yang berbeda tergantung dari kemampuan masing-masing anggota APEC antara lain kualitas supervisi, *level of reserves*, fleksibilitas *capital market*, peraturan dan lainnya. Ekonomi dengan *overvalued exchange rate* hanya akan mengakibatkan *capital crowding out*, *undervalued exchange rate* akan mengakibatkan *overshooting/overheating*. Tindakan Ekonomi yang melakukan penaikan *interest rates* untuk menghindari risiko *overheating* hanya akan memindahkan masalah. Sedangkan *capital control* akan berdampak pada komposisi *capital flows*. Dalam menghadapi risiko *overheating* ekonomi sebaiknya menerapkan *targeted prudent macroeconomic policies* pada sumber permasalahan.

Indonesia mengemukakan kebijakan domestik yang dilakukan dalam menghadapi tantangan meningkatnya volume dan volatilitas aliran modal. Kebijakan utamanya lebih diarahkan kepada menjaga stabilitas ekonomi makro melalui *policy mix* antara *monetary and macropudential policies*, termasuk stabilisasi nilai tukar dan manajemen cadangan devisa untuk stabilitas eksternal, serta tingkat bunga dan *macropudential policy* untuk stabilitas internal. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan pentingnya penguatan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Bank Sentral dalam *management capital flows* melalui beberapa kerja sama kebijakan seperti penguatan *surveillance* dan *supervise*, pendalaman keuangan (*financial deepening*)

antara lain melalui IPO BUMN, serta memperkuat jaring pengaman dan mitigasi resiko terhadap *sudden reversal* seperti pembuatan "*bond stabilization fund*" antara pemerintah dan BUMN, dan memformulasikan "*crisis management protocol*". Jepang menyampaikan dukungannya terhadap Indonesia terkait perlunya koordinasi di tingkat kawasan dan global dalam mengatasi risiko *capital flows*. Terkait perdebatan kebijakan *capital control*, Jepang menyampaikan bahwa kebijakan haruslah *tailor made* berdasarkan kondisi ekonomi dan haruslah dilakukan dengan *hollistic approach*. Komunikasi secara efektif harus dilakukan terhadap pasar. Pengembangan *local bond market* terutama untuk infrastruktur keuangan dapat dilakukan untuk menyerap *capital inflows*.

Rebalancing in the APEC Region (with Special Focus on Investment). IMF memaparkan bahwa walaupun di Amerika Latin dan Asia menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi, namun keduanya sangatlah berbeda. Pertumbuhan di Amerika Latin didorong oleh *domestic demand*, sedangkan pertumbuhan di Asia didorong oleh tingkat ekspor. Hal lain yang juga menarik adalah *rebalancing* pertumbuhan di Asia tidak dapat diartikan sama di beberapa ekonomi Asia. Turun tajamnya investasi di *export oriented* Asia disebabkan oleh turunnya *private investment*. Terdapat dua hal yang menghalangi investasi di Asia, yaitu permasalahan pendanaan dan kurangnya infrastruktur yang memadai. IMF merekomendasikan Asia untuk meniru keberhasilan Amerika Latin dalam menarik investasi melalui *Public Private Partnership*. IMF menilai bahwa Asia perlu menemukan sumber pertumbuhan yang baru, yaitu melalui sektor jasa dan keuangan.

Beberapa pendapat datang dari Perwakilan IFI's. *World Bank* berpendapat bahwa investasi publik, terutama infrastruktur, merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan ekonomi global. Dalam melakukan manajemen investasi publik perlu dikembangkan alat analisa untuk menentukan proyek yang sesuai dan tepat serta meningkatkan *state enterprise*

governance. Sementara itu, ADB menekankan pada pentingnya reformasi struktural di bidang investasi.

Ekonomi-ekonomi Asia harus melihat upaya *rebalancing economies* sebagai upaya yang dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing ekonomi. Asia sedang dalam proses untuk *rebalancing*. Banyak negara di Asia telah mengevaluasi kebijakan strategi ekspornya. ADB memfokuskan pada pentingnya mempertahankan stabilitas *intra-regional trade* untuk menyeimbangkan perekonomian global, melalui penguatan *effective exchange rate* dan performa perdagangan.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh ekonomi berkembang adalah (i) menghapus *traditional* dan *new type trade barriers* (*next generation*). (ii) *domestic demand* perlu ditingkatkan namun tetap menyesuaikan kondisi masing-masing ekonomi. (iii) *saving* perlu ditingkatkan sebagai alternatif terhadap *domestic demand* dan (iv) ADB sependapat dengan IMF bahwa Asia perlu menemukan sumber pertumbuhan baru. Namun bukan melalui sektor jasa dan keuangan, melainkan bidang manufaktur. Bidang manufaktur dinilai lebih memiliki *employment elasticity* yang lebih besar sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan bidang jasa dan keuangan. Selain itu, ADB beranggapan bahwa *financial inclusion* penting untuk dimasukkan dalam *rebalancing economies agenda*.

Tantangan pembangunan pasca krisis keuangan. Pembangunan menghadapi berbagai tantangan pasca krisis sebagai akibat dari krisis keuangan global yang kurang memberikan dorongan pada perubahan politik. Pada saat krisis moneter tahun 1997, beberapa negara berkembang di Asia memutuskan untuk melakukan *capital control* yang kemudian diikuti dengan reformasi struktural di bidang keuangan dan moneter. AS pada saat itu berpendapat bahwa permasalahan di Asia adalah *sequences* dari kebijakan.

AS beranggapan bahwa *capital control* merupakan kebijakan yang salah. Reformasi

struktural dan perbaikan institusi keuangan harus dilakukan sebelum dibukanya *capital market*. Ironisnya, satu dekade kemudian, perekonomian AS *collapse* disebabkan oleh kurang teregulasinya pasar keuangan.

Terdapat empat langkah yang dilakukan anggota APEC untuk menghadapi tantangan permasalahan krisis, antara lain: (i) *foreign finance* yang mencakup *capital mobility*, *short term volatility*, dan *unregulated shadow finance sectors* (ii) *social safety net*, (iii) *public sector management* termasuk kebijakan industri, (iv) peran lembaga internasional. China merupakan salah satu model pertumbuhan yang baik karena pemerintahnya berani untuk bereksperimen dalam menerapkan kebijakan publik, dan kebijakannya berorientasi pada pasar. *World Bank* beranggapan bahwa membandingkan dua ekonomi (AS dan China) yang memiliki struktur yang berbeda adalah kurang tepat.

Financial Inclusion. Pembahasan *financial inclusion* ditujukan untuk memberikan *guidance* yang bersifat konkret dan *practical* bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan penggunaan jasa keuangan oleh rumah tangga, perseorangan, wiraswasta, sehingga strategi kebijakan *financial inclusion* diharapkan dapat disesuaikan/*tailor made* dengan kebutuhan masing-masing anggota APEC. Pembahasan *financial inclusion* mencakup: (i) *The Challenge*, (ii) *Leadership in Practice*, (iii) *Building Knowledge of Consumer Demand*, (iv) *Financial Viability for Service Providers*, (v) *Inclusion Friendly Government-to-Person Payments (G2P)*, (vi) *Building Consumer Financial Capacity*, (vii) *Putting Ideas to Work*. Agenda workshop

AS menyampaikan bahwa terdapat tiga tantangan dalam mengimplementasikan *financial inclusion* bagi *the underserved people*, yaitu: tantangan kebijakan yang efektif, tantangan permintaan konsumen, dan viabilitas keuangan penyedia jasa.

The Challenge. Dimensi tantangan baik dalam maupun luasnya permasalahan, dampak terhadap pembangunan, dan hambatan untuk memperluas *financial*

inclusion dari masing-masing anggota APEC sebagai berikut:

- Dalam paparannya Mexico menyampaikan bahwa tidak ada definisi yang pasti mengenai *financial inclusion*, namun secara garis besar Mexico mendefinisikan *financial inclusion* pada akses dan penggunaan *clear and concise information appropriate regulatory framework*. *Financial inclusion* melengkapi stabilitas dan integritas keuangan. Keberhasilan *financial inclusion* bergantung pada tiga komponen, yaitu akses, tingkat penggunaan, dan kualitas. Akses sangat bergantung pada infrastruktur keuangan. Tingkat penggunaan sangat bergantung pada tersedianya produk yang tepat. Kualitas *financial inclusion* dapat dilihat pada tingkat perlindungan konsumen dan *financial literacy*. Tahapan pendekatan dalam mendesain kebijakan *financial inclusion* antara lain: (i) membuat instrumen untuk mengukur komponen *financial inclusion* (tingkat akses dan penggunaan), (ii) mendesain kebijakan publik berdasarkan data, (iii) mengukur dampak kebijakan publik, (iv) mendiseminasi informasi relevan untuk meningkatkan respon pasar. Pengembangan *financial inclusion* membutuhkan pendekatan yang komprehensif, infrastruktur yang sudah ada dengan kebijakan publik yang sesuai. Mexico menekankan pentingnya *willingness* dan komitmen dari seluruh *stakeholders* agar inisiatif *financial inclusion* dapat berjalan sukses dan berkelanjutan.
- Indonesia menyampaikan bahwa isu *financial inclusion* tidak hanya permasalahan membuka akses keuangan namun juga harus didukung kebijakan yang sesuai. *Financial inclusion* adalah aktivitas untuk mengurangi hambatan bagi *poor people* untuk menggunakan jasa keuangan. Pembahasan *financial inclusion* tidak berarti harus melalui bank, namun juga dapat melalui lembaga *non formal*, yaitu koperasi, dan lembaga kredit daerah. Mengingat luasnya cakupan, target yang

disusun dalam *financial inclusion* harus realistis. Target Indonesia adalah *productive poor people* yang tinggal di daerah *rural*. Indonesia membuat *literacy survey* untuk mengukur opini dan *basic needs* kebutuhan orang berdasarkan kapasitas dan *demographic barriers*. Untuk mencapai target tersebut perlu komitmen nasional yang kuat dari pembuat kebijakan, institusi keuangan formal dan non formal. Target dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif. Pilar *financial inclusion* ada lima, yaitu: *financial education, financial eligibility/ financial identity, supportive regulation, intermediate facilitating, distributions* (melalui *agent banking, phone banking, mobile banking*). Produk *financial inclusion* di Indonesia antara lain adalah tabungan tanpa biaya administrasi, kredit, sistem pembayaran, asuransi, dan jasa keuangan bagi UKM. Terkait jasa keuangan UKM, berdasarkan data dan penelitian, *Non Performing Loan* (NPL) UKM berada dibawah satu persen. *Financial stability and financial deepening* sangat penting untuk melakukan *financial inclusion*.

Leadership in Practice ditujukan untuk mengidentifikasi peran pemerintah dan mengeksplorasi langkah dalam menyusun strategi *financial inclusion*. Beberapa pandangan dari anggota APEC sebagai berikut:

- Malaysia menyampaikan bahwa 20 juta orang dewasa di Malaysia tidak memiliki akses terhadap produk keuangan, dimana 25 persen diantaranya adalah orang miskin di daerah pedesaan. Pemerintah berhasil mengajak tujuh bank swasta untuk bergabung dalam inisiatif *financial inclusion*. Ketujuh bank tersebut juga bersedia membuka cabang baru di beberapa daerah. Sebagai jalan keluar, Malaysia menggunakan lembaga yang ada untuk mencapai daerah terpencil, yaitu dengan menggabungkan infrastruktur perbankan dengan kantor pos. Pada tahun 2001, bank tidak memberikan pinjaman kredit bagi Usaha Kecil Menengah Mikro (UKMM) karena dianggap tidak *financial viable*. Tahun 2005, Malaysia melakukan *survey*, dan ternyata hanya 13 persen UKMM yang memiliki akses terhadap

institusi formal keuangan. Pemerintah melakukan *raising awareness* melalui pembentukan logo, sehingga UKMM dapat mengidentifikasi bank mana yang menyediakan produk *financial inclusion* untuk UKMM.

- Mexico menekankan peran pemerintah dalam menyusun peraturan dan hukum terkait *financial inclusion* untuk memastikan efisiensi dan transparansi program. Pemerintah sebaiknya juga menyusun kebijakan strategi nasional untuk meningkatkan akses terhadap keuangan dan meningkatkan penggunaan produk keuangan.
- Filipina pada pertengahan 1990-an, menyadari bahwa mayoritas UMKM tidak memiliki akses keuangan, terutama kredit dari lembaga keuangan formal. Filipina memperoleh bantuan dari *USAID* untuk melakukan studi terkait *microfinance*. Pada tahun 1998, pemerintah mengadakan pertemuan dengan pihak swasta untuk mendorong investasi swasta dalam pengembangan *microfinance*. Pada tahun 2010, Filipina memiliki 1500 *Microfinance Institutions* (MFI) dan 70 juta nasabah. Bahkan kini, bank swasta telah melakukan retail MFI.
- Thailand menyampaikan bahwa kesenjangan ekonomi di Thailand relatif tinggi dan tidak mengalami perbaikan signifikan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 1996 koefisien Gini sebesar 0,55 dan tahun 2009 sebesar 0,50. Orang miskin kurang memiliki akses terhadap keuangan. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk *National Microfinance Master Plan*, membentuk lembaga khusus untuk menangani *financial inclusion*, mengeluarkan *microinsurance scheme* serta *financial literacy scheme* dan lainlain.
- Malaysia menekankan bahwa pemerintah perlu merubah *mindset* dengan berhenti menyediakan subsidi pinjaman, dikarenakan keberhasilan subsidi tersebut tidak tercatat dengan jelas dan adanya permasalahan transparansi dalam pelaksanaannya. Permasalahan bukan

terletak pada pinjaman yang murah melainkan lebih pada akses. Pemerintah harus membuat model kebijakan yang berkelanjutan.

Building Knowledge of Consumer Demand dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan proses dalam menentukan pendekatan yang tepat ke konsumen serta peran pemerintah dalam proses tersebut. Beberapa pandangan dari anggota APEC sebagai berikut:

- Mexico menekankan pentingnya *measurement*. Data yang digunakan tidak perlu mahal. Mexico menggunakan data penawaran keuangan (jumlah *access points*, cabang bank, ATM, agen keuangan) dan sensus penduduk sebagai data awal *financial inclusion*. Memberikan informasi kepada pasar terkait keuangan tidak hanya membangun pengetahuan konsumen tentang keuangan melainkan juga untuk mempertahankan momentum dan menunjukkan komitmen Ekonomi dalam menerapkan *financial inclusion*.
- *World Bank* menekankan bahwa perlu adanya harmonisasi definisi *financial inclusion* antar negara dan perlunya pendekatan yang berkelanjutan untuk mengukur *financial inclusion*. Selain itu, *World Bank* menyampaikan perlunya menggunakan dan memanfaatkan semua *channel* dan infrastruktur yang ada untuk mensukseskan *financial inclusion*.
- Indonesia menyampaikan bahwa hal yang paling susah adalah menentukan data dan metodologi yang disepakati. Target Indonesia dalam menerapkan *financial inclusion* adalah *the productive poor people*. Indonesia mempunyai *household survey* yang mendapatkan dukungan dari *World Bank* dan *AFI*. Survey tersebut membutuhkan tiga tahun dalam pengerjaannya. Berdasarkan survey tersebut, Indonesia menentukan kebijakan nasional *financial inclusion* yang meliputi kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal yang terpenting adalah, seluruh *stakeholders* harus terlibat dalam pelaksanaan *financial inclusion*.

Financial Viability in Service Provision

ditujukan untuk mengeksplorasi hambatan non peraturan untuk mencapai *financial viability* bagi penyedia jasa *microfinance* serta potensi untuk meningkatkan *financial viability* penyedia jasa *microfinance*. Pada sesi ini, panelis terdiri dari ADB dan ABAC serta perusahaan swasta seperti *Master Card* dan *Citi Foundation*. Panelis menyampaikan pentingnya untuk memberikan insentif kepada swasta untuk bergerak dalam *low cost value models*. Terdapat beberapa pandangan dari ABAC dan ADB sebagai berikut:

- ABAC menyampaikan bahwa sebelum tahun 2007, *microfinance* dianggap sebagai program CSR dan tidak *financially viable*. Naamun sejalan dengan waktu, tumbuh ketertarikan swasta untuk masuk ke dalam *microfinance*. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk mendorong penyedia jasa dalam inisiatif *financial inclusion*, antara lain (i) perlunya kerangka peraturan yang kuat, (ii) meningkatkan *financial viability* melalui pendekatan *regulatory* dan *non regulatory* serta melibatkan seluruh pihak, (iii) mengangkat resiko teknologi dan *market infrastructure*.
- ADB mengidentifikasi beberapa hambatan *non regulatory*, yaitu apakah institusinya *self sufficient*, apakah produknya *financially viable*, *transaction cost*, *inefficiency distribution acquisition cost of products*, dan SDM.

Inclusion Friendly Government-to-Person Payment (G2P) ditujukan untuk mengeksplorasi peran *G2P payment* pada anggota APEC, membahas proses transisi dari pembayaran secara tunai ke *G2P payments*, dan kunci utama untuk membuat *G2P payments* menjadi *financial inclusion friendly*. *World Bank* menyampaikan bahwa 2,7 miliar orang (70% adult population) tidak memiliki akses ke jasa keuangan seperti tabungan dan *checking account*. *G2P* dapat meningkatkan secara signifikan tingkat *financial inclusion*. *G2P* dapat mengurangi biaya pembayaran bagi pengguna/pemerintah, meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi, dan peluang bagi penerima untuk menabung. Tapi

hal ini hanya bisa dilakukan apabila terdapat *broader payment infrastructure*, jasa yang ditawarkan terjangkau (murah) dan penyedia jasa dapat beroperasi (*commercially viable payment*). Selain itu, penting untuk memastikan bahwa tabungan yang telah dibuka, dimanfaatkan/ digunakan oleh konsumen. *World Bank* menekankan pentingnya menggunakan infrastruktur yang ada untuk menyediakan jasa keuangan. Perwakilan *World Bank* mencontohkan kantor pos sebagai penyedia layanan keuangan. Pendapat tersebut dipertanyakan oleh Indonesia, terutama terkait *financial integrity* dan *financial stability* apabila kantor pos dapat menyediakan jasa keuangan.

Building Consumer Financial Capacity

ditujukan untuk membangun kapasitas konsumen melalui *financial education*. Program pembangunan kapasitas keuangan konsumen yang dilakukan bertujuan untuk berkontribusi terhadap keberhasilan inisiatif *financial inclusion* secara keseluruhan dan harus memberikan efek jangka panjang. Salah satu hal yang penting dalam melakukan *financial education* adalah harus mengetahui konsumen dan kebutuhan konsumen terhadap produk keuangan. Program pembangunan kapasitas keuangan konsumen untuk meningkatkan *awareness* dapat dilakukan melalui *workshop*, seminar, kurikulum pendidikan, iklan di media cetak atau media elektronik. Secara keseluruhan, peserta diskusi beranggapan bahwa pembangunan kapasitas keuangan konsumen dapat dilakukan oleh inisiatif pemerintah.

---oOo---